

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan dalam Tinjauan Kriminologi

1. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran

Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang.²⁰ Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Dalam ketentuan pasal 86 KUHP sebagai berikut: “Apabila disebut kejahatan baik dalam arti suatu kejahatan yang tertentu pada umumnya atau suatu kejahatan pada khususnya, maka disini termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, jika dikecualikan oleh suatu peraturan lain”.²¹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.²²

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran di dalam Buku Ketiga. Kejahatan merupakan *rechtsdelict*

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta

²¹ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

²² Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 78

atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetdelict* atau delik undang-undang.²³ Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan,²⁴ misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang,²⁵ misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenai helm ketika mengendarai sepeda motor.

Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukum denda sedangkan Kejahatan adalah mengenai hal-hal besar yang diancam dengan pidana lainnya.²⁶

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdeliktern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang

²³ ibid

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

menentukan demikian.²⁷ Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.²⁸

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu (Moeljatno, 2002:74) :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
4. Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal pembarengan (*concurus*) pada pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat. (pasal 65, 66, 70).²⁹

²⁷ ibid

²⁸ ibid

²⁹ ibid

2. Pengertian Kriminologi

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.³⁰

Pengertian kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-puitis. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.³¹

Sedangkan pengertian kriminologi, secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum empiric, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan (*field research*).³²

Hal inilah yang dimungkinkan timbulnya suatu pemahaman tersebut diatas yang senantiasa mengidentifikan kriminologi dengan perilaku

³⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indah, Jakarta

³¹ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampal Kriminologi*, Jakarta, CV Rajawali, hal 1-2

³² *ibid*

kejahatan. Secara etimologi, ada beberapa macam bentuk definisi dari kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli hukum diantaranya adalah:

1. Mr. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luanya.

2. J. Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.

3. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab dan akibat-akibatnya.³³

Moeljatno membagi kriminologi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Criminal Biology

Kajian criminal biology mengarah atau ditujukan secara khusus kepada diri seseorang yang menyebabkannya melakukan suatu kejahatan.

b. Criminal Sociology

Adalah faktor sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan atau aspek sosial yang lain

³³ Noach Simandjuntak dan Pasaribu, 1984, Kriminologi, Tarsito, Bandung .

memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan.

c. Criminal Policy

Adalah tindakan-tindakan atau kebijakan apa saja yang hendaknya ditempuh agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan.

Simandjuntak mengemukakan bahwa didalam kriminologi mengandung berbagai ilmu pengetahuan, yaitu :

- a. Antropologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Kajian utamanya lebih kepada ciri-ciri jasmaniah penjahat dan hubungan antara satu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang.
- b. Sosiologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Psikologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang di dalam terjadinya suatu kejahatan.
- d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa.
- e. Penologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu.

f. Kriminalistik, adalah ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan.³⁴

3.Kajian Kejahatan dalam Aspek Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.³⁵

Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.³⁶

³⁴ B. Simandjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung.

³⁵ Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 9.

³⁶ *ibid*

Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.³⁷

Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.³⁸

Kejahatan pada umumnya dibagi dalam tipe-tipe kejahatan didasarkan pada dua aspek yaitu cara atau modus operandi kejahatan dan obyek hukum yang diserangnya atau dilanggar oleh kejahatan tersebut.

Tipe kejahatan di bagi tiga yaitu :

- a. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Dan sebaliknya kejahatan yang sedemikian rupa yang mana si korban pada waktu

³⁷ ibid

³⁸ Soedjono, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara, Hal. 15

dilakukan kejahatan tidak dapat melihat perbuatan dan pelakunya, misalnya pemfitnah, penadahan dan pemalsuan, dan lain-lainnya.

- b. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat-alat khusus, seperti senjata, obeng, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan dengan bom. Dan sebaliknya ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik atau meninju.
- c. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisiki, ancaman kekerasan fisik maupun psikis, tipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan, pengancaman, pemerasan serta penipuan. Dan sebaliknya ada yang dilakukan dengan cara yang biasa seperti mencuri barang di tempat yang mudah dijangkau.³⁹

Sedangkan tipe kejahatan jika dilihat berdasarkan obyek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa tipe yaitu antara lain:

- a. *Kejahatan terhadap keamanan Negara*
- b. *Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden*
- c. *Kejahatan terhadap ketertiban umum*
- d. *Kejahatan terhadap kekuasaan umum*
- e. *Kejahatan terhadap kesusilaan*
- f. *Kejahatan terhadap kebebasan orang*
- g. *Kejahatan terhadap nyawa orang*
- h. *Kejahatan terhadap harta benda*
- i. *Kejahatan politik*
- j. *Kejahatan konvensional*
- k. *Kejahatan terorganisasi*

³⁹ R. Soesilo, 1985, Kriminologi, Politeia, Bogor

1. *Kejahatan profesional*⁴⁰

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit* (Hermien Hadiati Koeswadji, 1983:1).⁴¹ Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana yang didefinisikan oleh beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴²

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Untuk mengetahui bagaimana dua pandangan tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan/tindak pidana maka akan dijelaskan dua pandangan tersebut.

⁴⁰ R. Soesilo, 1985, Kriminologi, Politeia, Bogor

⁴¹ A. Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 31

⁴² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 71

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal art) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (criminal reponbility). Dibawah ini disajikan beberapa batasan/pengertian tindak pidana dari para sarjana yang menganut pandangan monistis

1. D Simons

Menurut simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti itu maka menurut simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana.

2. J. Bauman

Menurut J. Bauman perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wiryono Prodjodikoro

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

b. Pandangan Dualistik

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Menurut pandangan dualistik dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistik untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung jawaban pidana. Dibawah ini dikemukakan batasan tentang tindak pidana yang di berikan oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistik.

1. Pompe

Menurut pompe dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit (tindakan, pen) yang diancam pidana dalam ketentuan

undang-undang. Menurut pompe, dalam hukum positif sifat melawan hukum kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

2. Moeljatno

Menurut moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan tersebut maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif)⁴³

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. *Harus ada suatu perbuatan manusia*
2. *Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum*
3. *Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan*
4. *Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum*
5. *Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.*⁴⁴

⁴³ Tongat, 2008, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, Umm Press, Malang

⁴⁴ Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 86

Apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau syarat penjatuhan pidana kedua pandangan diatas sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Dua pandangan sama-sama mempersyaratkan bahwa untuk adanya pidana harus ada perbuatan/tindak pidana (criminal act) dan pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility). Yang membedakan dua pandangan diatas adalah adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana oleh karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik criminal act maupun criminal responsibility, sementara dalam pandangan dualistis keseluruhan syarat untuk adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana, oleh karena dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup criminal act tidak mencakup criminal responsibility. Ada pemisahan antara perbuatan (pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu.⁴⁵

2. Jenis – Jenis Tindak pidana

1. Penggolongan Tindak Pidana Menurut Doktrin

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

⁴⁵ Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM press

a.1 Kejahatan

Secara doctrinal kejahatan adalah *Rechdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala per se*. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelict* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

a.2 Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *westdelicht* yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *westdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan dan sebagainya.

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

b.1 Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah ditentukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dapat diklsifikasikan sebagai tindak pidan formil adalah pasal 362 KUHP, penghasutan pasal 160 KUHP.

b.2 Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahawa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaannya.

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omisionis dan delik comisionis per omissionis comissa

c.1 Delik Comissionis

Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan

c.2 Delik Omissionis

Delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap saksi di muka pengadilan

c.3 Delik Comissionis Per Omissionis Comissa

Delik Comissionis Per Omissionis Comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan da dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa)

d.1 Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP

d.2 tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang pasal 359 KUHP

e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda

e.1 Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, misal pencurian, penipuan

e.2 Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang sedang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus

f.1 Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus.

f.2 Tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

g.1 Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena

atau yang dirugikan. Dengan demikian apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a. Tindak pidana aduan absolute

suatu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b. Tindak pidana aduan relative

Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dalam lingkungan keluarga kemudian menjadi tindak pidana aduan.

g.2 Tindak pidana bukan aduan yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi

h.1 Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan

h.2 Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.⁴⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴⁷ Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

- Melawan hukum (onrechtmatig)
- Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur Obyektif :

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif :

- Orang yang mampu bertanggung jawab
- Adanya kesalahan (dellus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- Perbuatan (manusia)
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

a. Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

(3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

(4) Unsur melawan hukum⁴⁸

Menurut pendapat Tongat, bahwa menurut Rancangan KUHP baru tindak pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negative yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ Moeljatno, 1998, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

2. Harus bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat
3. Tidak ada alasan pembeda.⁴⁹

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Perilaku jahat manusia menurut Kohlberg di tentukan oleh setidaknya dua faktor yaitu:

- a. Faktor pendorong yaitu keinginan yang datang dari dalam manusia sendiri, yang menuntut untuk dipenuhi egoism dan rangsangan yang datang dari luar.
- b. Faktor penghambat yaitu kendali dari dalam diri sendiri (moral) dikontrol dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain-lain.⁵⁰

Becker berpendapat menurutnya kejahatan terjadi karena proses labeling sebagai akibat reaksi masyarakat. Masyarakat member cap yang jelek sehingga mengganggu jiwanya yang kemudian frustrasi sehingga dilakukannya suatu kejahatan⁵¹.

Sedangkan aristoteles (384. 322 S.M) berpendapat bahwa : “adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan”⁵².

⁴⁹ Tongat, 2008, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Umm Press, Malang

⁵⁰ Noach Simanjuntak dan pasaribu. 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung

⁵¹ Ramli Atmasmita, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung

⁵² Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.

Hal ini sebenarnya sering di kemukakan oleh para sarjana dalam mencari sebab-sebab pokok terjadinya kejahatan, karena masalah ini yang dianggap paling penting diantara faktor-faktor lain.

Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa kebanyakan kejahatan salah satunya juga disebabkan karena bacaan dan film yang dianggap punya pengaruh yang tidak baik terhadap remaja terutama gambar-gambar kekerasan, pemukulan, pengeroyokan atau tawuran yang baru-baru ini di perbincangkan maka akan memberi dorongan kepada kecenderungan kriminal dan membuat pelanggaran. Terutama bagi remaja yang masih dalam pubertas adalah sangat rawan dan cenderung ikut-ikutan teman maka orang tua harus lebih memperhatikan dan memberi pengertian-pengertian yang baik agar si anak tidak melakukan tindak kejahatan. Kenyataan yang tidak bisa disangkal lagi bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa seseorang baik secara individu maupun sebagai makhluk masyarakat. Jadi setiap manusia dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya selalu mengikuti keadaan lingkungan dimana ia hidup. Atau dengan kata lain, keadaan lingkungan dimana seseorang biasanya hidup, berpengaruh besar terhadap tingkah laku dan perbuatan orang tersebut.

Faktor lingkungan itu sendiri juga beragam jenisnya, oleh karenanya yang menjadi titik sorot adalah faktor lingkungan yang berasal dari acara televisi seperti smack down, tinju atau berita tentang penganiayaan,

pembunuhan dan tawuran juga bisa menyebabkan terjadinya tindak criminal.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana adalah kesempatan. Kesempatan merupakan susunan keadaan disekitar waktu tindak pidana dilakukan. Faktor ini harus dipandang sebagai penyebab sesungguhnya dan yang pokok adanya tindak pidana. Mengenai hal ini beberapa ahli sosiologi berpendapat sama mengenai penyebab kejahatan karena adanya kesempatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya berdasarkan dari sudut pandang sosiologis yaitu : bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.⁵³

Teori Causa / penyebab kejahatan

Menurut ajaran kausalitet adanya suatu akibat pasti ada hal yang menyebabkannya. Sebab itu tidak hanya satu tetapi merupakan rangkaian dari sebab-sebab yang menimbulkan suatu akibat. Didalam kriminologi dikenal dengan apa yang disebut Ethionologi criminal yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana akan dijumpai bermacam-macam faktor, suatu faktor tertentu belum pasti merupakan sebab dari suatu tindak pidana.

⁵³ Edwin H. Sutherland, 1996, Azaz-azaz Kriminologi, Sinar Grafika, Jakarta

Hal ini dikatakan bahwa untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak pidana dapat dikatakan sukar karena baru dilihat dari faktor faktor pribadi pengaruh lingkungan dan pengaruh lainnya seperti riwayat hidupnya sejak kecil. Menurut Multiple Factory Theory:

“Kejahatan adalah hasil dari factor-faktor yang beraneka ragam, dan factor factor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu skema tertentu. Atau lain perkataan untuk menerangkan kelakuan criminal memang tidak ada teori ilmiah.”⁵⁴

Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga factor yang berpengaruh secara timbale balik yaitu:

- a. Pemilihan pekerjaan ditentukan oleh bakat maupun lingkungan
- b. Norma-norma jaatan terutama didalam pekerjaan yang terus menerus menimbulkan kontak
- c. Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan⁵⁵

Menurut pandangan Becker, kejahatan terjadi karena proses labeling sebagai akibat reaksi masyarakat. Masyarakat memberi cap yang jelek sehingga mengganggu jiwanya yang kemudian frustasi sehingga dilakukannya suatu kejahatan.⁵⁶

Factor-faktor yang tidak kalah pentingnya dengan factor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana adalah kesempatan. Kesempatan

⁵⁴ R. Soesilo, kriminologi, Politea Bogor, 1985, hal 15

⁵⁵ Noach Simanjuntak dan Pasaribu, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984, Hal 378

⁵⁶ Ramli Atmasasmita, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, hal 39

merupakan susunan keadaan disekitar waktu tindak pidana dilakukan. Factor ini harus dipandang sebagai sesungguhnya dan yang pokok adanya tindak pidana.

Mengenai hal ini beberapa ahli sosiologi berpendapat sama mengenai penyebab kejahatan karena adanya kesempatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya berdasarkan dari sudut pandang sosiologis yaitu “bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat , masyarakat yang mmeberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah didalam pergaulan masyarakat itu sendiri.”⁵⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa (**Estimologi**), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia (**W.J.S Poerwadarminta, 1990 : 425**), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : ” Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain

⁵⁷ Edwin H. Sutherland, Azas-azas Kriminologi, diperbanyak oleh fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Malang, tanpa tahun

dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain “⁵⁸ Kekerasan juga bisa diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.⁵⁹

Dengan demikian adanya tindakan kekerasan dari pelaku menyebabkan timbulnya *victim*. *Victim* atau korban mempunyai arti yaitu orang-orang yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita atau mengalami kerugian⁶⁰.

Adapun makna yang terkandung di dalam istilah tindak kekerasan adalah “suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, mati, atau kerusakan fisik atau sekelompok orang lain”. Jadi tindak kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera atau mati atau kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat menyiksa (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or*

⁵⁸ W.J.S Poerwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hal 484

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ Tindak Pidana Kekerasan, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>. diakses tanggal 21 Desember 2012

suffering).⁶¹ Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁶²

Selama ini esensi dari kekerasan di dalam KUHP kurang jelas pengaturannya, hal ini menyebabkan beberapa ahli hukum turut serta mendefinisikan bahwa kekerasan yang digunakan sedemikian rupa harus mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis dan bertentangan dengan hukum. Kekerasan ini menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik yang berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata serta memiliki akibat-akibat dari kerusakan terhadap harta benda/fisik/mengakibatkan kematian kepada seseorang. Pengertian ini sedemikian luas karena menyangkut perbuatan “mengancam” nyawa seseorang. Pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 89 juncto pasal 90 KUHP menyebutkan bahwa: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan⁶³

Pasal 90 KUHP:

Luka berat berarti :

1. *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;*
2. *Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencariannya;*

⁶¹ Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 20

⁶² Thomas Santoso, 2002, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 11

⁶³ Moeljatno, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hal 36

3. *Kehilangan salah satu panca indera;*
4. *Mendapat cacat berarti (vermiking);*
5. *Menderita sakit lumpuh;*
6. *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
7. *Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;*⁶⁴

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Dalam pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mengidentifikasi 3 wilayah kekerasan biasanya terjadi :⁶⁵

Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.

Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya :

Bentuk dari kekerasan itu adalah :

- a. Kekerasan *fisik* adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yaitu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya. Misalnya memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, menampar, menonjok, mencekik, menganiaya tubuh,

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1994

menyudut rokok, memaksa ke tempat yang membahayakan keselamatan diri.

b. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, bisa berbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi, penghinaan dan ancaman.

c. Kekerasan *seksual* adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Ibarat awan dan hujan, demikianlah hubungan antar seks dan kekerasan. Dimana terdapat seks maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Bentuknya bisa berupa rabaan, ciuman, sentuhan yang tidak dikehendaki, pelecehan seksual, memaksa kita untuk melakukan hubungan seks.

d. Kekerasan *Psikologis/jiwa* adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal. Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut. Berupa cacian, makian, umpatan, hinaan, menjadikan kita bahkan olok-olok dan tertawaan ataupun menyebut dengan julukan yang membuat sakit hati.⁶⁶

⁶⁶ Achie Sudiarti Luhulina, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Bandung, PT Alumni

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan pasal tersebut, kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul dengan tangan atau senjata, menendang. Pasal 170 KUHP mengatur tentang saksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dalam penerapan pasal ini, objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian :

- (1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama- lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum :
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. ⁶⁷

⁶⁷ Lihat ktiab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa, hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana public dapat melihatnya.
3. Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa)
4. Kekerasan yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus diujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Ancaman hukum pasal 170 ini, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun karena berbicara mengenai luka berat. Pasal 90 KUHP memberikan definisi luka berat sebagai berikut:

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus menerus tidak cakap lagi melakukan

jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Dari definisi yang diberikan pasal 90 KUHP diatas, dapat diterangkan bahwa:

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang professional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat.
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap pasal 90 ini, R. Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selamanya.
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai kehilangan salah satu panca indera. Panca indera itu berupa kehilangan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
4. Lumpuh (verlamming) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat

5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat.
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam pasal 90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan saksi atau dokter yang biasa kita sebut *visum et repertum*.

Sedangkan dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, adapun unsure-unsur yang memuat tindak penganiayaan tersebut adalah:

- a. Unsure kesengajaan
- b. Unsure perbuatan
- c. Unsure akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh:
 - Luka tubuh
- d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Penggunaan pasal 170 ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351 pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan

dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki bagian dari pasal 351. Kekerasan yang dilakukan sesuai pasal 170 sudah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar pasal 170 dengan pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu dihadapan orang banyak atau druang public terbuka, sedangkan pada pasal 351 hal ini tidak dibedakan apakah dilakukan diruang tertutup untuk umum ataupun diruang public terbuka.

Ancaman hukuman pasal 170 KUHP ini lebih berat daripada pasal 351 KUHP. Apabila kita dibandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal; ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada pasal 170 lebih berat daripada pasal 351. Pada pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka sipelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, sedangkan pada pasal 351 dengan akibat yang sama yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

E. Tinjauan Umum Mengenai Tempat Hiburan Malam

1. Macam-macam Tempat Hiburan Malam

Kata hiburan malam berasal dari dua suku kata, yaitu hiburan dan malam. Kata hiburan memiliki persamaan arti kata dengan kata *entertainment* dalam yang mana bahasa Inggris, sedangkan malam disini lebih cenderung untuk menunjukkan waktu malam hari.

Tempat hiburan malam adalah tempat atau suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan kesenangan bagi orang-orang agar dapat menghilangkan kejenuhan dari berbagai aktivitas dan dari berbagai perasaan yang tidak enak atau susah yang sedang dirasakan orang-orang tersebut yang ada pada malam hari.⁶⁸

Beragam hiburan memang disediakan oleh pengusaha-pengusaha hiburan di berbagai kota. Tempat-tempat baik itu di tengah kota atau pinggiran kota kerap menyajikan hiburan yang bisa dinikmati siapa saja. Tak ubahnya kota-kota megapolitan dan kota metropolitan, kota-kota kecil yang tersebar di seluruh nusantara pun tidak ketinggalan menyajikan beragam hiburan pada malam hari. Hiburan malam memang hampir selalu dicari oleh orang-orang yang mencari kesenangan, entah itu memang hobi setiap malam atau sekadar untuk melepas keletihan dan kejenuhan rutinitas sehari-hari. Hingar-bingarnya memang membuat malam yang identik dengan keheningan dan kegelapan seakan berbeda. Kilauan lampu-lampu jalan, keramaian kafe-kafe tenda, dan dentuman-dentuman musik di *night*

⁶⁸ Hertika, 2003, Hedonisme dan Perkembangannya, Rajawali Pers, Jakarta, hal 85

club menjadikan malam semakin semarak. Dengan adanya hiburan malam di berbagai kota, malam seolah-olah telah berubah menjadi surga dunia dengan segala kesenangan-kesenangannya. Hiburan malam tidak hanya disediakan bagi kaum-kaum berkantong tebal saja, yang berkantong tipis atau berpenghasilan pas-pasan pun bisa menikmati hiburan malam yang ada. Hanya saja mungkin berbeda kelas dalam fasilitas yang disediakan. Apa pun bentuknya, apa pun fasilitasnya, hiburan malam tetap membuat siapapun yang menyukainya akan merasa bahagia.

- a. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan menyanyi yang diiringi music dan disertai dengan atraksi pertunjukkan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa layanan makan dan minum.
- b. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum.
- c. Lounge. Hiburan yang satu ini tergolong hiburan yang cukup mewah karena biasanya bertempat di café-café berkelas atau hotel-hotel bintang besar. Lounge adalah tempat santai yang mempertunjukkan *live performance* dari penyanyi lokal. Biasanya ruangnya cukup luas, berdesain mewah, dilengkapi dengan sofa dan meja untuk para pengunjungnya. Lounge memang tidak hanya dihadirkan malam hari saja, siang hari pun lounge tetap buka. Hanya saja peminatnya lebih banyak yang memilih untuk datang malam hari daripada siang hari. Rutinitas

siang hari yang cukup padat membuat pengunjung lebih memilih menikmati sajian musik di lounge malam hari sembari bersantai. Itu sebabnya, lounge menjadi salah satu alternatif pilihan untuk hiburan pada malam hari. Peminat lounge beragam, tidak terbatas *gender* namun terbatas usia. Untuk lounge-lounge yang dihadirkan di beberapa hotel-hotel mewah tidak semua mengizinkan pengunjungnya masuk jika belum berusia di atas 18 tahun. Alasannya karena hiburan ini adalah bagian dari hiburan malam, maka yang pantas menikmatinya pun harus sudah dikategorikan usia dewasa.

- d. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi music hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa layanan makan dan minum.
- e. Pub, bar, café adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
- f. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum
- g. Play station adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk ketangkasan dengan menggunakan mesin play station
- h. Rumah billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum

- i. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.⁶⁹

2. Instrumen Hukum Mengenai Tempat Hiburan Malam

Untuk dapat menindak lanjuti adanya pelanggaran-pelanggaran dan aturan-aturan di tempat hiburan malam diperlukan adanya peraturan yang tegas, yaitu diantaranya:

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum di Kota Malang.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/ HK.501/ MKP/ 2010 Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

F. Modus Operandi Suatu Tindak Pidana

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian modus sendiri adalah :

1. Cara, metode

⁶⁹ Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri

2. Bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan dengan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan;
3. Nilai yang paling besar adalah frekuensinya dalam suatu deretan;
4. Angka statistic yang sering muncul dalam populasi atau sampel

Sementara pengertian modus operandi adalah modus yang digunakan untuk menjalankan suatu tindak pidana.⁷⁰

Berdasarkan dari pengertian Kamus Umum Bahasa Indonesia diatas, maka yang dimaksud modus operandi adalah suatu cara atau upaya melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tiap-tiap pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan cara yang beraneka ragam, khusus dan antara cara yang satu dengan pelaku yang lainnya tidak sama. Modus operandi suatu perbuatan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.⁷¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan faktor lain. Menurut Horgan semua kejahatan dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu:

1. Kesempatan (opportunity) berupa kebetulan atau diciptakan dan
2. Kebutuhan (need) yang sebenarnya atau diimpikan.⁷²

⁷⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, Edisi Pertama, 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English, Press Jakarta, hal 990

⁷¹ Soesilo, 1980, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor, hal 19

⁷² ibid

Pembagian tipologi kejahatan menurut R. Soesilo didasarkan pada dua aspek yaitu: pertama, berdasarkan obyek hukum yang diserangnya atau dilanggar oleh kejahatan itu, dan kedua berdasarkan cara atau modus operandi kejahatan tersebut.⁷³

Apabila dilihat dari cara atau modus operandinya kejahatan, bentuk atau tipe kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan
2. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu khusus yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia, penganiayaan dengan pentungan, pencurian dengan cara merusak kunci pakai linggis.
3. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, tipu daya, pemaksaan seperti permerkosaan, perampokan dan lain-lain. Sebaliknya ada pula yang dilakukan dengan cara biasa seperti mencuri barang di tempat yang mudah dijangkau tanpa pelaku harus menggunakan kekerasan atau tipu daya.⁷⁴

Adapun berdasarkan konsep yang dikemukakan R. Soesilo diatas, maka secara umum kejahatan memiliki modus operandi sebagai berikut:

⁷³ Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan Tentang sebab-sebab Kejahatan), Politea, Bogor, hal 15

⁷⁴ ibid

- a. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak mengetahui pelaku kejahatan tersebut dan tidak sadar akan tindak kejahatannya.
- b. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu
- c. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, tipu daya dan pemaksaan.⁷⁵

Modus operandi kejahatan ini merupakan bentuk yang paling umum dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu.

G. Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Prof Dr W.M.E Noach bahwa “kejahatan sesungguhnya tidak dapat dihilangkan dalam masyarakat yang mungkin adalah hanya mengurangi atau membatasi adanya kejahatan tersebut,⁷⁶ pernyataan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Barnes & Teeters, bahwa kejahatan akan selalu ada seperti adanya penyakit dan kematian pada manusia yang selalu pasti terjadi serta berulang-ulang adanya.⁷⁷

Prof Sudarto berpendapat bahwa salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan kebijakan criminal dan kebijakan sosial. Kebijakan criminal atau politik criminal secara sederhana diartikan

⁷⁵ R Soesilo, 1990, *Modus Operandi suatu Kejahatan*, Bumi Aksara, Jakarta

⁷⁶ Noach, Simanjutak dan Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, hal 6

⁷⁷ Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, hal 53

sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁷⁸

Dalam ilmu kriminologi secara garis besar dikenal ada 2 cara penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Moralistik adalah penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/ akhlak dan budi pekerti agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.
2. Abolisionistik adalah penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.⁷⁹

Pada upaya moralistic dimaksudkan agar mempertebal mental, moral masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik atau para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan, yang kegiatannya dapat dilakukan dengan dakwah, kuliah subuh atau kegiatan agama yang lainnya yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan.
3. Memberikan penerangan atau penyuluhan mengenai akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain.

⁷⁸ Sudarto, 1997, Peranan Kriminologi dalam Hukum Pidana, FH Unair, Surabaya, Pelita, hal 34

⁷⁹ Soekanto, 1993, Kriminologi, sebab dan Penanggulangan Kejahatan, Sinar grafika, Jakarta, hal 36

4. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi sosial maupun pemerintah

Sedangkan upaya abolisionistik dapat dilakukan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negative tersebut (kejahatan), yang kemudian dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang paling baik sehingga setidaknya tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, sosiolog, antropolog, ekonom, ahli hukum, praktisi hukum dan tentunya kriminolog.⁸⁰

2. Penanggulangan yang bersifat Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁸⁰ Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni, hal 157

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Sedangkan Purniati berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional meliputi :

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya
2. Pemantapan hukum dan perundangan
3. Pemantapan system peradilan
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan

Lebih jauh purniati berpendapat bahwa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sesungguhnya lebih baik dari pada penegakan setelah terjadinya kejahatan dengan alasan bahwa :

1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan yang sudah terjadi.
2. Tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan atau penjara) maupun korban

3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.⁸¹

Berkenaan dengan langkah tersebut, Sudarto dengan lebih rinci berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pencegahan secara langsung dan tidak langsung.

Pencegahan langsung yaitu dengan cara:

Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi dan lain-lain;

- a. Penjagaan atau patrol
- b. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi
- c. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial
- d. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna
- e. Pencegahan dengan cara tidak langsung yaitu berupa penyuluhan /pendidikan/pembinaan moral dan penimbulkan kesan adanya suatu pengawasan.⁸²

Sedangkan Reckless mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut:

1. Upaya dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana
2. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan menjangkau ke masa depan

⁸¹ Purniati dan Kemal Darmawan, 1994, *Mahzab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 87

⁸² Sudarto, op cit, hal 35

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat cepat tepat dan murah serta sederhana
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah dalam menanggulangi kejahatan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan.⁸³

3. Penanggulangan yang Bersifat Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.⁸⁴

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.⁸⁵

⁸³ Soekanto, 1993, *Kriminologi sebab dan penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 36

⁸⁴ Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, hal 157

⁸⁵ *ibid*

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan disini tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani (1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a. *Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.*
- b. *Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.⁸⁶*

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan

⁸⁶ Abdul Syani, 1987, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Djambatan, Jakarta, hal 139

agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.⁸⁷

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani (1987:141) sebagai berikut :

*Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia .*⁸⁸

⁸⁷ ibid

⁸⁸ Abdulsyani, 1987, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 141

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.